

Analisis Kelompok Rentan pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tangga melalui *Corporate Social Responsibility* PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM)

Zainuddin Iqbal Sidabutar¹, Subandi², Dikka Prasetyo³

^{1,2}PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM)

³Universitas Diponegoro

Corresponding Author: iqbal@inalum.id, subandi@inalum.id, prasdikka@alumni.undip.ac.id

Published: Agust , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kelompok rentan dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM). Menggunakan metode penelitian campuran dengan pendekatan Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA), penelitian ini mengidentifikasi 41 individu yang termasuk dalam kategori kelompok rentan dengan karakteristik keterbatasan kepemilikan aset dan hambatan akses terhadap permodalan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Temuan menunjukkan bahwa kerentanan sosial berkorelasi langsung dengan keterbatasan akses untuk meningkatkan taraf hidup dan kemampuan mengelola aset ekonomi. Program pemberdayaan melalui CSR PLTA INALUM perlu difokuskan pada penguatan kemampuan warga dalam mengelola potensi yang dimiliki dengan memperhatikan keterbatasan akses sosial dan aset ekonomi kelompok rentan.

Kata kunci: kelompok rentan, pemberdayaan masyarakat, *corporate social responsibility*, PLTA INALUM, Desa Tangga

ABSTRACT

This study analyzes vulnerable groups in a community empowerment program in Tangga Village, Aek Songsongan District, Asahan Regency, through the Corporate Social Responsibility (CSR) of PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM). Using a mixed-methods research approach, including Rapid Rural Appraisal (RRA) and Participatory Rural Appraisal (PRA), this study identified 41 individuals categorized as vulnerable, characterized by limited asset ownership and limited access to capital, education, and health services. Findings indicate that social vulnerability is directly correlated with limited access to improving living standards and the ability to manage economic assets. The empowerment program through the CSR program of INALUM's hydroelectric power plant (PLTA) needs to focus on strengthening the ability of residents to manage their potential, while addressing the limited social access and economic assets of vulnerable groups.

Keywords: vulnerable groups, community empowerment, *corporate social responsibility*, INALUM hydroelectric power plant, Tangga Village

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur energi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) memberikan dampak signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) sebagai perusahaan yang mengoperasikan PLTA di wilayah Asahan memiliki tanggung jawab sosial untuk memberdayakan masyarakat di sekitar area operasinya, khususnya kelompok rentan yang sering kali terpinggirkan dari proses pembangunan (Elkington, 1997).

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam konteks perusahaan energi tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi yang lebih luas (Porter & Kramer, 2006). Dalam industri energi, khususnya pembangkit listrik, dampak operasional terhadap masyarakat lokal seringkali kompleks dan memerlukan

pendekatan yang komprehensif untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Desa Tangga yang secara resmi terbentuk sejak tahun 1950 merupakan salah satu desa dalam wilayah Ring 1 PLTA INALUM yang memiliki Bendungan Tangga sebagai ikon utama. Bendungan ini dibangun antara tahun 1978-1982 oleh PT Indonesia Asahan Aluminium untuk memanfaatkan Sungai Asahan dalam memproduksi energi bagi pembangkit listrik tenaga air. Keberadaan infrastruktur ini memainkan peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Desa Tangga, namun juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Pembangunan infrastruktur besar seperti bendungan sering kali menciptakan paradoks pembangunan, dimana manfaat ekonomi makro tidak selalu terdistribusi secara merata kepada masyarakat lokal (Cernea, 2000). Fenomena ini menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang dapat memperdalam kerentanan kelompok masyarakat tertentu, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.

Konsep kelompok rentan merujuk pada individu atau komunitas yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menghadapi risiko tinggi terhadap kemiskinan, marginalisasi, atau eksklusi sosial (Sen, 1999). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, identifikasi dan penanganan kelompok rentan menjadi krusial untuk memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif (UNDP, 2020).

Kerentanan dalam masyarakat rural memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan kerentanan di wilayah urban. Faktor geografis, ketergantungan terhadap sumber daya alam, dan keterbatasan akses terhadap layanan publik menjadi dimensi penting yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis kerentanan di desa (Ellis, 2000). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang karakteristik dan dinamika kelompok rentan di tingkat desa menjadi fondasi penting dalam merancang program pemberdayaan yang efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kelompok rentan di Desa Tangga dan mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan masyarakat melalui CSR PLTA INALUM dalam mengatasi kerentanan sosial ekonomi yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan, pola distribusi geografis kelompok rentan, dan implikasinya terhadap desain program CSR yang lebih responsif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method) yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif termanifestasi dalam pendekatan survei dan eksperimental, sedangkan metode kualitatif mencakup

pendekatan naratif, fenomenologis, teori mendasar, etnografi, dan studi kasus (Creswell, 2014). Pemilihan metode campuran didasarkan pada kompleksitas fenomena kerentanan yang memerlukan pemahaman mendalam tentang aspek kualitatif sekaligus dukungan data kuantitatif untuk validasi temuan.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada periode 26 Agustus hingga 8 September 2023. Desa ini dipilih karena merupakan salah satu wilayah Ring 1 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang memiliki potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya sosial yang perlu diidentifikasi dalam rangka program pengembangan masyarakat.

Pengumpulan data menggunakan pendekatan Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA). RRA digunakan untuk mengumpulkan informasi secara cepat tentang kondisi masyarakat dengan prinsip triangulasi data untuk mengurangi bias dan meningkatkan kualitas data (McCracken et al., 1988). Metode RRA memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam waktu yang relatif singkat melalui teknik-teknik seperti observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan analisis data sekunder.

Sementara PRA diterapkan untuk pengembangan program bersama masyarakat melalui siklus pengembangan program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Chambers, 1994). Pendekatan PRA memungkinkan masyarakat untuk menjadi subjek aktif dalam proses penelitian, bukan hanya objek yang diteliti. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan masyarakat lokal, khususnya kelompok rentan, dapat teridentifikasi secara akurat dan komprehensif.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 20 informan kunci yang terdiri dari aparatur desa, guru, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemuda. Pemilihan informan kunci dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat dan memiliki pengalaman dalam menangani isu-isu sosial di tingkat desa. Selain itu, dilakukan survei terhadap 25 responden yang mewakili berbagai kelompok masyarakat dari empat dusun di Desa Tangga. Survei ini dirancang untuk memperoleh data kuantitatif tentang profil sosial ekonomi, tingkat akses terhadap layanan publik, dan persepsi masyarakat terhadap program pemberdayaan.

Data sekunder diperoleh dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2022, Buku Induk Kependudukan Desa Tangga 2023, Buku Monografi Desa Tangga 2023, dan Data Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Kecamatan Aek Songsongan 2023. Analisis data sekunder ini memberikan konteks historis dan demografis yang penting untuk memahami dinamika kerentanan di Desa Tangga.

Proses analisis data menggunakan pendekatan triangulasi untuk memverifikasi konsistensi temuan dari berbagai sumber data. Data kualitatif dianalisis menggunakan teknik content analysis dan thematic analysis, sedangkan data kuantitatif dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran profil kelompok rentan dan distribusinya di Desa Tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Tangga

Desa Tangga terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Aek Songsongan dengan luas wilayah 3.150 hektar yang terbagi menjadi empat dusun. Distribusi luas wilayah menunjukkan pola yang tidak merata, dimana Dusun IV memiliki luas wilayah terbesar (907 hektar), diikuti Dusun I (859 hektar), Dusun II (716 hektar), dan Dusun III (605 hektar). Pola distribusi ini memiliki implikasi penting terhadap aksesibilitas dan distribusi layanan publik di masing-masing dusun.

Wilayah desa didominasi oleh area perkebunan, ladang, dan sawah dengan jarak 30 km dari pusat pemerintahan kabupaten, 95 km dari pusat pemerintahan kota, dan 185 km dari ibukota provinsi. Kondisi geografis ini menempatkan Desa Tangga dalam kategori desa terpencil yang menghadapi tantangan aksesibilitas terhadap layanan publik dan peluang ekonomi di pusat-pusat perkotaan. Jarak yang relatif jauh dari pusat pemerintahan dan layanan publik menjadi faktor struktural yang berkontribusi terhadap kerentanan masyarakat lokal.

Karakteristik topografi Desa Tangga yang berada di kawasan pegunungan dan dialiri Sungai Asahan memberikan potensi sumber daya alam yang signifikan, namun juga menciptakan tantangan dalam pengembangan infrastruktur dan akses transportasi. Keberadaan Bendungan Tangga sebagai infrastruktur strategis menciptakan dinamika khusus dalam kehidupan masyarakat, dimana manfaat ekonomi dari pembangkit listrik tidak selalu terdistribusi secara merata kepada masyarakat lokal.

Tata kelola pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh tiga Kepala Seksi (Pelayanan, Kesejahteraan, dan Pemerintahan), Sekretaris Desa, tiga Kepala Urusan (Tata Usaha dan Umum, Keuangan, dan Perencanaan), serta empat Kepala Dusun. Struktur organisasi ini dilengkapi dengan Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan dua anggota. Struktur pemerintahan yang relatif lengkap ini menunjukkan potensi kapasitas institusional yang dapat dimanfaatkan dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat.

Identifikasi Kelompok Rentan

Berdasarkan hasil penelitian, teridentifikasi 41 individu yang termasuk dalam kategori kelompok rentan di Desa Tangga. Seluruh kelompok rentan ini berada di Dusun III dan merupakan penerima bantuan sosial dari pemerintah. Konsentrasi geografis ini

menunjukkan adanya faktor struktural dan spasial yang berkontribusi terhadap tingkat kerentanan yang lebih tinggi di Dusun III dibandingkan dengan dusun lainnya.

Karakteristik kerentanan yang dihadapi meliputi keterbatasan kepemilikan aset dan hambatan akses terhadap permodalan, pendidikan/peningkatan kapasitas, serta layanan kesehatan. Analisis mendalam terhadap profil kelompok rentan menunjukkan bahwa mereka menghadapi multiple deprivations yang saling memperkuat dan menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.

Distribusi kelompok rentan menunjukkan konsentrasi geografis yang signifikan di Dusun III, yang mengindikasikan adanya faktor struktural yang mempengaruhi tingkat kerentanan di wilayah tersebut. Kondisi ini sejalan dengan temuan Moser (1998) yang menyatakan bahwa kerentanan sering kali memiliki dimensi spasial yang berkaitan dengan akses terhadap sumber daya dan layanan publik. Konsentrasi ini juga menunjukkan bahwa faktor geografis seperti topografi, akses jalan, dan kedekatan dengan fasilitas publik memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kerentanan masyarakat.

Analisis mendalam terhadap 41 individu kelompok rentan menunjukkan bahwa kerentanan yang mereka hadapi dapat dikategorikan ke dalam dua dimensi utama: kerentanan yang termanifestasi di skala individu dan masalah sosial individu potensial. Kedua kategori ini kemudian diobservasi pada aspek individu, infrastruktur, sosial, dan ekonomi.

Dari aspek individu, kelompok rentan menghadapi tantangan berupa keterbatasan keterampilan dan pendidikan formal yang memadai. Mayoritas dari mereka hanya menyelesaikan pendidikan dasar dan tidak memiliki keterampilan khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses peluang ekonomi yang lebih baik. Kondisi kesehatan yang kurang optimal juga menjadi hambatan, dimana beberapa anggota kelompok rentan mengalami masalah kesehatan kronis yang membatasi produktivitas mereka.

Dari aspek infrastruktur, kelompok rentan di Dusun III menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan yang layak, listrik yang stabil, dan akses internet. Kondisi jalan yang kurang baik mempersulit mobilitas untuk mengakses peluang ekonomi dan layanan publik. Keterbatasan akses internet membatasi kemampuan mereka untuk mengakses informasi dan peluang ekonomi digital yang semakin berkembang.

Analisis Kerentanan Akses dan Aset

Kelemahan akses secara individu tercermin dalam beberapa masalah utama yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Pertama, mobilitas harian yang terbatas disebabkan oleh ketersediaan akses transportasi yang minim. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan kendaraan pribadi, tetapi juga dengan minimnya transportasi publik yang melayani rute dari Dusun III ke pusat layanan publik dan peluang ekonomi.

Keterbatasan mobilitas ini menciptakan isolasi geografis yang mempersulit kelompok rentan untuk mengakses layanan publik dan peluang ekonomi di luar wilayah desa.

Kedua, keterbatasan akses fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berkualitas merupakan manifestasi dari isolasi geografis yang dihadapi. Jarak yang relatif jauh dari pusat layanan publik (30-185 km) menjadi hambatan signifikan bagi kelompok rentan yang memiliki keterbatasan finansial. Biaya transportasi yang tinggi relatif terhadap pendapatan mereka seringkali menjadi penghalang utama dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Akibatnya, kelompok rentan cenderung mengandalkan fasilitas lokal yang terbatas atau bahkan menunda akses terhadap layanan yang dibutuhkan.

Ketiga, terdapat potensi konflik horizontal dengan desa lain dalam pengelolaan Air Terjun Ponot sebagai sumber daya alam yang berpotensi menjadi objek wisata. Konflik ini tidak hanya berimplikasi terhadap hilangnya peluang ekonomi dari sektor pariwisata, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial yang dapat memperburuk kondisi kerentanan. Ketidakjelasan dalam pengelolaan sumber daya alam ini mencerminkan lemahnya governance lokal dan kurangnya mekanisme resolusi konflik yang efektif.

Keempat, kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan formal dan penambahan modal usaha merupakan hambatan struktural yang signifikan. Kelompok rentan umumnya tidak memiliki agunan yang memadai dan riwayat kredit yang dapat diterima oleh lembaga keuangan formal. Mereka juga seringkali tidak familiar dengan prosedur dan persyaratan perbankan, yang membuat mereka bergantung pada sumber pembiayaan informal dengan biaya yang tinggi. Keterbatasan ini mengakibatkan kelompok rentan sulit mengembangkan aktivitas ekonomi produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Kelemahan akses ini berkorelasi langsung dengan kelemahan aset di sektor individu secara keseluruhan. Mayoritas responden mengalami kesulitan transportasi karena minimnya fasilitas infrastruktur yang diiringi dengan keterbatasan kepemilikan kendaraan pribadi. Kondisi ini tidak hanya membatasi mobilitas fisik, tetapi juga mobilitas sosial dan ekonomi yang penting untuk keluar dari kondisi kerentanan.

Kondisi ini turut menjadi hambatan dalam mengakses infrastruktur pendidikan yang terletak di luar kawasan Desa Tangga. Anak-anak dari keluarga rentan seringkali harus menempuh jarak yang jauh untuk mengakses sekolah menengah, yang tidak jarang menyebabkan mereka putus sekolah atau tidak dapat mengoptimalkan prestasi akademik mereka. Hal ini menciptakan reproduksi kemiskinan antar generasi, dimana keterbatasan pendidikan orang tua berimplikasi terhadap keterbatasan akses pendidikan anak-anak mereka.

Kesulitan akses layanan kesehatan berakibat pada penurunan kualitas kesehatan individu dalam keluarga. Keterlambatan dalam penanganan masalah kesehatan tidak hanya berimplikasi terhadap kondisi fisik, tetapi juga terhadap produktivitas ekonomi keluarga. Beberapa keluarga harus mengeluarkan biaya yang signifikan untuk pengobatan, yang

dapat menguras tabungan dan bahkan menyebabkan mereka berhutang. Keterbatasan akses finansial tercermin pada kondisi dimana beberapa keluarga membutuhkan tambahan pendapatan meski sudah bekerja di sektor formal, menunjukkan bahwa pendapatan dari sektor pertanian tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Temuan ini mendukung argumen Chambers (1995) yang menyatakan bahwa kemiskinan dan kerentanan merupakan fenomena multidimensional yang melibatkan interaksi kompleks antara faktor ekonomi, sosial, dan institusional. Dalam konteks Desa Tangga, interaksi antara keterbatasan geografis, akses terbatas terhadap layanan publik, dan lemahnya aset ekonomi menciptakan web of disadvantage yang sulit diputus tanpa intervensi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Implikasi bagi Program CSR PLTA INALUM

Identifikasi kelompok rentan di Desa Tangga memiliki implikasi penting bagi desain dan implementasi program Corporate Social Responsibility PLTA INALUM. Berdasarkan analisis kerentanan, program CSR perlu dirancang dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap akar penyebab kerentanan yang telah teridentifikasi.

Pertama, penguatan akses transportasi dan infrastruktur dasar untuk mengurangi isolasi geografis kelompok rentan menjadi prioritas utama. Program ini dapat mencakup pembangunan jalan desa yang menghubungkan Dusun III dengan pusat layanan publik, penyediaan transportasi publik dengan subsidi, atau bantuan kendaraan produktif bagi kelompok rentan. Hal ini sejalan dengan prinsip CSR yang menekankan pada pembangunan berkelanjutan dan inklusif (Carroll, 2016). Investasi dalam infrastruktur transportasi tidak hanya mengurangi biaya akses, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.

Kedua, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan melalui program mobile service atau pembangunan fasilitas satelit di wilayah terpencil merupakan strategi yang efektif untuk mengatasi keterbatasan geografis. Program mobile clinic dapat memberikan layanan kesehatan dasar secara berkala di Dusun III, sementara program mobile education dapat memberikan layanan pendidikan non-formal dan pelatihan keterampilan. Pembangunan pos kesehatan atau sekolah satelit dapat memberikan solusi jangka panjang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Ketiga, pengembangan program pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas yang disesuaikan dengan potensi lokal dan kebutuhan pasar menjadi kunci untuk meningkatkan human capital kelompok rentan. Program ini dapat mencakup pelatihan pertanian modern, pengolahan hasil pertanian, keterampilan wirausaha, dan literasi digital. Pendekatan pelatihan harus partisipatif dan mempertimbangkan jadwal dan kondisi peserta, serta memberikan sertifikasi yang diakui untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.

Keempat, fasilitasi akses terhadap modal usaha mikro melalui kerjasama dengan lembaga keuangan atau pengembangan sistem kredit mikro berbasis komunitas dapat mengatasi hambatan permodalan yang dihadapi kelompok rentan. Program ini dapat mencakup pembentukan kelompok simpan pinjam, fasilitas kredit mikro dengan bunga rendah, atau hibah modal usaha untuk kelompok yang paling rentan. Pendampingan manajemen keuangan dan usaha perlu menjadi bagian integral dari program ini untuk memastikan keberlanjutan usaha yang dikembangkan.

Kelima, pengembangan potensi wisata Air Terjun Ponot melalui pendekatan kolaboratif antar desa untuk menghindari konflik horizontal dan memaksimalkan manfaat ekonomi bagi seluruh komunitas. Program ini memerlukan mediasi dan fasilitasi untuk membangun kesepahaman antar desa, pengembangan kapasitas pengelolaan wisata, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Pengembangan wisata berbasis komunitas dapat memberikan sumber pendapatan alternatif yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

Program-program ini perlu dirancang dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan kelompok rentan sebagai subjek aktif dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan yang menekankan pada penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat (Friedmann, 1992). Partisipasi aktif kelompok rentan tidak hanya memastikan bahwa program sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi juga membangun ownership dan keberlanjutan program.

Model Pemberdayaan Berbasis Kerentanan

Berdasarkan analisis temuan penelitian, diperlukan model pemberdayaan yang secara spesifik mengatasi akar penyebab kerentanan di Desa Tangga. Model ini harus mempertimbangkan interkoneksi antara kerentanan individu, keterbatasan akses, dan kelemahan aset yang saling memperkuat satu sama lain.

Model pemberdayaan yang direkomendasikan adalah pendekatan holistik yang mengintegrasikan tiga komponen utama: penguatan aset, peningkatan akses, dan pengembangan kapasitas. Penguatan aset meliputi program bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan sarana produksi. Peningkatan akses mencakup perbaikan infrastruktur transportasi, layanan kesehatan keliling, dan program pendidikan non-formal. Pengembangan kapasitas melibatkan pelatihan manajemen usaha, literasi finansial, dan penguatan organisasi masyarakat. Implementasi model ini memerlukan koordinasi yang erat antara PLTA INALUM sebagai perusahaan, pemerintah desa, dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan multi-stakeholder ini penting untuk memastikan keberlanjutan program dan menghindari duplikasi upaya (Waddell, 2005).

KE Simpulan

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi 41 individu kelompok rentan di Desa Tangga yang terkonsentrasi di Dusun III dengan karakteristik utama berupa keterbatasan kepemilikan aset dan hambatan akses terhadap permodalan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kerentanan sosial yang dihadapi berkorelasi langsung dengan keterbatasan akses untuk meningkatkan taraf hidup dan kemampuan mengelola aset ekonomi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerentanan di Desa Tangga memiliki dimensi multifaset yang melibatkan aspek geografis, ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Isolasi geografis yang diperparah oleh keterbatasan transportasi, ditambah dengan minimnya akses terhadap layanan publik berkualitas, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus oleh kelompok rentan. Program Corporate Social Responsibility PLTA INALUM perlu dirancang dengan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada bantuan material, tetapi juga penguatan kapasitas dan peningkatan akses. Model pemberdayaan yang direkomendasikan adalah integrasi antara penguatan aset, peningkatan akses, dan pengembangan kapasitas dengan melibatkan partisipasi aktif kelompok rentan dalam seluruh proses program. Implementasi program CSR harus mempertimbangkan konsentrasi geografis kelompok rentan di Dusun III dan mengembangkan strategi khusus untuk mengatasi tantangan struktural yang dihadapi. Kerjasama multi-stakeholder antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan yang berkelanjutan dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Carroll, A. B. (2016). Carroll's pyramid of CSR: Taking another look. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 1(1), 3-8.
- Cernea, M. M. (2000). Risks, safeguards and reconstruction: A model for population displacement and resettlement. *Economic and Political Weekly*, 35(41), 3659-3678.
- Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953-969.
- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: Whose reality counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173-204.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone Publishing.
- Ellis, F. (2000). *Rural livelihoods and diversity in developing countries*. Oxford University Press.
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. Blackwell Publishers.

- McCracken, J. A., Pretty, J. N., & Conway, G. R. (1988). An introduction to rapid rural appraisal for agricultural development. International Institute for Environment and Development.
- Moser, C. (1998). The asset vulnerability framework: Reassessing urban poverty reduction strategies. *World Development*, 26(1), 1-19.
- Pemerintah Kabupaten Asahan. (2022). Profil Kabupaten Asahan.
- Pemerintah Kecamatan Aek Songsongan. (2023). Peta Administratif Kecamatan Aek Songsongan.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). Strategy and society: The link between competitive advantage and Corporate Social Responsibility. *Harvard Business Review*, 84(12), 78-92.
- RPJM Desa Tangga. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tangga 2023-2029.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- UNDP. (2020). Human Development Report 2020: The next frontier - Human development and the Anthropocene. United Nations Development Programme.
- Waddell, S. (2005). *Societal learning and change: How governments, business and civil society are creating solutions to complex multi-stakeholder problems*. Greenleaf Publishing.